

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pergantian kepemimpinan dalam suatu negara yang terjadi melalui pemilihan umum merupakan suatu peralihan kekuasaan yang wajar serta dapat dikatakan demokratis. Bagi negara yang baru tumbuh dan masih harus belajar berdemokrasi, seringkali harus menghadapi suatu rezim kepemimpinan yang begitu lama dalam memerintah. Dampak dari pemimpin yang terlalu lama berkuasa akan menumbuhkan suatu rezim otoriter. Dalam sejarah politik negara-negara di dunia, setiap penumbangan rezim otoriter, sering kali melalui proses besar yang disebut *coup d'état* (kudeta). Peralihan kepemimpinan melalui kudeta biasanya dilakukan oleh pihak militer yang bisa juga melibatkan warga sipil. Kudeta membutuhkan bantuan intervensi massa atau kekuatan bersenjata yang besar.

Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian kekuasaan. Pergantian kekuasaan di Indonesia ada yang melalui proses pemilihan umum, namun ada pula yang melalui proses penyerahan kekuasaan dalam situasi yang penuh ketegangan politik. Peralihan kepemimpinan dari Soekarno kepada Soeharto, tidak terjadi begitu saja melalui proses yang mulus. Pada kurun waktu tahun 1965-1967 merupakan tahun-tahun yang penuh intrik dan ketegangan politik. Peristiwa dini hari tanggal 1 Oktober 1965 dapat dilukiskan sebagai percobaan kudeta yang gagal dari golongan kontra-revolusioner yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Tindakan-

tindakan yang diambil oleh Jenderal Soeharto sejak Peristiwa 30 September 1965 sampai diangkat sebagai pejabat presiden pada tahun 1967, merupakan kudeta merangkak (*creeping coup*).<sup>1</sup> Proses kudetanya tidak langsung menghantam, melainkan secara perlahan. Bahkan setelah kekuasaan beralih, Soekarno masih berstatus sebagai presiden. Inilah dualisme kepemimpinan yang terjadi dalam kurun waktu peralihan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto.

Peristiwa 30 September 1965 menjadi titik awal bagi keruntuhan Soekarno dari panggung politik Indonesia. Peristiwa ini masih menyimpan misteri tentang pelaku dan pihak sebenarnya yang harus bertanggung jawab, namun titik awal inilah yang kemudian menghasilkan berbagai persepsi dan hasil studi menyangkut jatuhnya Presiden Soekarno sepanjang periode 1965-1967. Turunnya Soekarno dari kursi kepresidenan melahirkan suatu pemerintahan baru yang memiliki semangat untuk menegakkan Pancasila dan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tekad inilah yang disebut sebagai Orde Baru dan melahirkan kepemimpinan baru yaitu Soeharto.

Tafsir atau peristiwa yang menjadi titik awal dimulainya peralihan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto, sebagaimana yang telah disebarluaskan kepada masyarakat selama 32 tahun rezim Orde Baru berkuasa, cenderung merupakan penilaian tunggal dan bersifat *indoktriner*. Di samping itu, cukup banyak bahan sejarah dan saksi peristiwa tersebut yang akhirnya

---

<sup>1</sup> Soebandrio, *Kesaksianku tentang G-30-S*, Jakarta: Forum Pendukung Reformasi Total, 2001, hlm. 60-61.

melahirkan pendapat yang beraneka ragam. Secara khusus mengenai pergantian kekuasaan negara dari Soekarno kepada Soeharto, telah memunculkan dugaan adanya kudeta yang dilakukan Soeharto terhadap Soekarno. Terlihat jelas ketika pasca penyerahan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar/SP 11 Maret) 1966, benar-benar dimanfaatkan oleh Soeharto sebagai pengemban surat sakti, dengan mengambil kebijakan dan keputusan politik, seperti pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ormas-ormasnya. Padahal dictum dari Supersemar sendiri lebih menekankan pada penyerahan kekuasaan militer (dalam artian pengamanan jalannya pemerintahan) dan bukan sebagai penyerahan kekuasaan politik. Supersemar bukanlah *transfer of authority* (pengalihan kekuasaan) dari presiden Soekarno kepada Soeharto.<sup>2</sup> Hal-hal inilah yang mengindikasikan adanya kudeta perlahan dalam proses peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto.

Jatuhnya Soekarno dari kursi kepresidenan memang tidak bisa lepas dari Peristiwa 30 September 1965 yang menewaskan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang dikenal loyal terhadap pemerintahan Soekarno namun anti komunis. Dalam kasus Peristiwa 30 September 1965 (G 30 S) tidak ada interpretasi tunggal dan akhir. Berbagai versi bermunculan, buku putih berjudul "*Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*" yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara tahun 1994 merupakan salah satu versi yang kemudian menjadi acuan

---

<sup>2</sup> Lembaga Analisa Informasi, *Kontroversi Supersemar dalam Transisi Kekuasaan Soekarno-Soeharto*, Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 1998, hlm. 84

buku pelajaran Sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Menurut buku tersebut, dalang dari G 30 S adalah Partai Komunis Indonesia (PKI).

Harold Crouch (1978) dalam bukunya *The Army and Politics in Indonesia* mengungkapkan bahwa menjelang tahun 1965, Angkatan Darat pecah menjadi tiga faksi. Faksi tengah yang loyal pada Soekarno (dipimpin Men/Pangad, Mayjen. A. Yani), namun menentang kebijakan Soekarno tentang persatuan nasional (konsep Nasakom). Faksi kanan bersikap menentang A. Yani yang Soekarno, didalamnya terdapat Jenderal Nasution dan Mayjen Soeharto. Kedua faksi ini sama-sama anti PKI. Faksi yang ketiga yaitu faksi kiri yang merupakan perwira-perwira menengah ke bawah yang telah diifiltrasi oleh PKI. Peristiwa G 30 S ditujukan untuk menyingkirkan faksi tengah dan kemudian menghabisi faksi kiri yang dijadikan kambing hitam, sehingga akan melapangkan jalan bagi perebutan kekuasaan oleh kekuatan sayap kanan Angkatan Darat. Angkatan Darat sejak 1962 mengalami perpecahan. Terkait dengan Gerakan 30 September, unsur-unsur Angkatan Darat dan Angkatan Udara terlibat dalam aksi tersebut bersama dengan ormas-ormas PKI.<sup>3</sup>

Versi yang sekarang juga banyak dikupas yaitu berupa dokumen tentang sejauh mana keterlibatan Badan Intelejen Amerika Serikat (*Central Intelligence Agency/CIA*) dalam peristiwa penggulingan Soekarno. Bahan-bahan itu sekarang dapat diperoleh dan dikaji lebih mendalam sehubungan

---

<sup>3</sup> Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*, Terjemahan Hasan Basri, Jakarta: LP3ES, 1986.

dengan ketentuan undang-undang Amerika Serikat sendiri yang menyatakan bahwa semua dokumen negara yang bersifat rahasia dan telah berumur 30 tahun atau lebih dapat dipublikasikan dan diketahui khalayak secara terbuka. Abad XX dapat dikatakan sebagai abad Intervensi, abad Intel. Abad ini menjadi puncak kecanggihan *intelligence* yang sangat berkuasa diseluruh dunia, mendominasi kepentingan hidup manusia. Negara-negara adikuasa, terutama Amerika Serikat, sering mengaduk-aduk negri orang lain dengan sasaran utama negri-negri dunia ketiga, khusus Indonesia, Soekarno dianggap paling menghambat garis politik “dunia bebas”. Data yang dibebankan CIA ini dapat ditelusuri benang merahnya guna melacak kisah penggulingan Soekarno dan Peristiwa 30 September 1965, walaupun bisa dipastikan masih banyak informasi penting yang disembunyikan.<sup>4</sup>

Bagi Soekarno, dunia barat termasuk Amerika Serikat memiliki unsur-unsur *The Old Established Forces (Oldefos)* yang masih bercokol dan mengaca dalam rumah tangga negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Itulah sebabnya globalisme ekonomi dan politik, globalisme *intelligence*, globalisme budaya yang berwatak destruktif bagi kesejahteraan dan perdamaian bumi manusia, harus dihadapi dengan kerjasama dan penggalangan globalisme solidaritas *The New Emerging Forces (Nefos)* sedunia bahwa:

Indonesia pada tahun 1960-an termasuk Negara yang tidak disukai oleh blok barat pimpinan Amerika Serikat (AS). Di era Perang Dingin itulah

---

<sup>4</sup> Joesoef Isak (ed.), *Dokumen CIA Melacak Penggulingan Sukarno dan Konspirasi G30S 1965*, Jakarta: Hasta Mitra, 2002, hlm. vi

konflik utama dunia terjadi antara Kapitalis (dipimpin AS) melawan Komunis (Uni Soviet dan RRC). AS sedang bersiap-siap mengirimkan pasukan untuk menghabisi komunis di Korea Utara dan juga Vietnam Utara. Sementara di Indonesia, Partai Komunis (PKI) merupakan partai legal. Saat kebencian AS terhadap Indonesia memuncak dengan menghentikan bantuannya, Presiden Soekarno menyambutnya dengan pernyataan keras: “*Go to hell with your aid!*”. Sebagai pemimpin Negara yang relatif baru lahir, Presiden Soekarno mengucapkan kebijakan berani: “*Berdiri pada kaki sendiri (berdikari)*”. Dasar sikap ini yaitu kenyataan bahwa alam Indonesia begitu kaya raya. ...., sehingga ada harapan besar bahwa suatu saat nanti Indonesia akan makmur tanpa bantuan barat.<sup>5</sup>

Presiden Soekarno saat itu juga begitu konfrontatif terhadap Amerika Serikat, Inggris, dan sekutunya yaitu dengan pernyataan Ganyang Nekolim (*Neo Kolonialis dan Imperialis*) bangsa barat. Sikap dan tindakan Soekarno dengan menyerukan Dwikora untuk Ganyang Malaysia juga menjadikan Soekarno sebagai tokoh yang mengancam kedudukan blok kapitalis di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, akibatnya sikap AS juga jelas yaitu gulingkan Soekarno.

Amerika Serikat telah berhasil gemilang dengan membendung komunisme di Eropa Barat sesuai Perang Dunia II melalui Marshall Plan-nya. Di Dunia Ketiga, AS menemukan cara yang jauh lebih murah, cukup meneteskan dollar pada sekutu-sekutu lokalnya. AS melalui CIA menggunakan militer dan jenderal-jenderal lokal “*our local army friends*” sebagai sekutu terpercaya untuk menghalau komunisme, demikian juga yang terjadi di Indonesia. Menurut Peter Dale Scott (1985) dalam bukunya yang berjudul *Peran CIA dalam Penggulingan Soekarno* menyimpulkan bahwa

---

<sup>5</sup> Soebandrio, *op.cit.*, hlm. 1.

dalang utama Peristiwa 30 September 1965 adalah CIA yang ingin menjatuhkan Soekarno dan kekuatan komunis (teori domino). CIA bekerja sama dengan sayap kanan Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI melalui isu adanya dewan Jenderal. Keterlibatan PKI dalam hal ini tidaklah secara nasional dan institusional. Hanya para pemimpin PKI saja (D. N. Aidit, Nyoto, Ir. Sakirman, dan pimpinan PKI lainnya) yang jelas-jelas terlibat karena termakan isu yang dilemparkan CIA. Keterlibatan CIA cukup beralasan jika dikaitkan dengan konteks Perang Dingin.

Keterlibatan CIA dalam penggulingan Soekarno menurut Willem Oltmans (2001) dalam bukunya yang berjudul *Di Balik Keterlibatan CIA: Bung Karno Dikhianati?* tidak lepas dari intervensinya terhadap militer Indonesia dengan meracuni pikiran beberapa perwira Indonesia bahwa menyingkirkan Soekarno merupakan tugas patriotik demi menghalau komunis di Indonesia. Perwira-perwira ini merupakan anggota Angkatan Darat yang memperoleh pendidikan militer AS dan para perwira daerah yang bekerja sama dengan CIA dalam melaksanakan program *civic mission* membendung kekuatan komunis di daerah. Bahkan CIA berhasil meyakinkan salah seorang perwira yang memegang tampuk pimpinan militer pasca peristiwa Gerakan 30 September yaitu Soeharto, bahwa PKI-lah yang bersalah dan harus disingkirkan bersama dengan Soekarno yang enggan mengutuk keterlibatan PKI dalam peristiwa tersebut.

Dalam pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarnodi depan Sidang Umum IV MPRS tanggal 22 juni 1966 yang berjudul Nawaksara (Sembilan

Laporan Pokok) dan Pelengkap Nawaksara tanggal 10 Januari 1967, Presiden Soekarno mengungkapkan bahwa Peristiwa G 30 S itu ditimbulkan oleh pertemuan tiga sebab, yaitu keblingeran pimpinan PKI, kelihaiian subversi Nekolim (AS/CIA dan sekutunya), dan adanya oknum-oknum dalam Angkatan Darat yang tidak benar.<sup>6</sup> Jelaslah bahwa Soekarno sendiri juga tidak menutup kemungkinan adanya pihak asing, khususnya AS melalui CIA, turut andil dalam upaya menggoyahkan kedudukan dirinya sebagai presiden.

Dari berbagai versi yang ada, cukup masuk akal bila dikatakan tidak ada pelaku tunggal dalam Peristiwa 30 September 1965. dalam konteks Perang Dingin, keterlibatan unsur AS (CIA) sangatlah mungkin, demikian juga dengan peran elit pengurus PKI, dan adanya persekongkolan suatu kelompok kecil dalam Angkatan Darat dan Angkatan Udara yang mencoba menangkap dan menghadapkan beberapa jenderal kepada Presiden Soekarno.<sup>7</sup> Akhir dari semua ini menjadikan Soekarno sebagai orang yang sangat dicelakakan hingga dia digulingkan dari kekuasaannya karena tidak mau mengutuk PKI, sementara Soeharto nantinya justru menjadi orang yang sangat diuntungkan karena para saingannya sesama jenderal telah tersingkir menjadi korban dan dia dapat melenggang ke kursi kepresidenan.

Kajian ini akan memfokuskan tema pokok mengenai sejarah politik terkait dengan dukungan AS (CIA) terhadap karier politik Soeharto dalam

---

<sup>6</sup> Indra Ismawan (ed.), *Kumpulan Pernyataan Bung Karno tentang Gerakan 30 September: Benarkah Gerakan 30 September Didalangi Bung Karno?*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2006, hlm. 66.

<sup>7</sup> Asvi Warman Adam, *Soeharto File: Sisi Gelap Sejarah Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2006, hlm. 79-80.

kurun waktu 1965-1967 sebagai upaya menyingkirkan Soekarno dari kekuasaannya. Permasalahan ini dikaji dengan menggunakan pendekatan teori politik dan secara khusus teori kekuasaan. Peristiwa 30 September 1965 menjadi titik awal dari dimulainya peralihan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto. Sejak saat itulah, Soeharto tampil sebagai kekuatan baru yang mampu menguasai keadaan dan melakukan tindakan-tindakan politis untuk mengikis kekuasaan Soekarno. Tanggal 12 Maret 1967, MPRS mencabut kekuasaan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia yang tidak lama kemudian dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Diungkap pula sejauh mana dukungan AS dalam kurun waktu 1965-1967 melalui program-program bantuannya bagi pemerintahan yang baru. Kajian ini ditulis dalam skripsi dengan judul “ Dukungan Amerika Serikat terhadap Karier Politik Soeharto Suatu Kajian Sejarah Politik Penggulingan Soekarno 1965-1967”.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini adalah dukungan CIA (AS) terhadap awal karier politik Soeharto sebagai presiden, dimulai dengan berbagai kedekatan dan kerja sama CIA dengan Angkatan Darat (Soeharto) yang melancarkan suatu *Creeping Coup* sebagai upaya penggulingan Soekarno. Maka penulis membuat penjabaran rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana peran Mayjen Soeharto menyangkut peristiwa 30 September 1965 sampai diangkat menjadi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) sekaligus Panglima Angkatan Darat?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Soeharto sampai pada akhirnya berhasil menduduki kursi kepresidenan?
3. Bagaimana peranan Amerika Serikat (CIA) dalam karier politik Soeharto dalam upayanya menduduki kursi kepresidenan?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

- a. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir kritis, analitis, objektif dan sistematis dalam penulisan karya sejarah serta kepekaan terhadap peristiwa masa lampau untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk melangkah di masa depan dengan landaan pemahaman isi dan nilai yang terkandung dalam setiap peristiwa sejarah.
- b. Sebagai sarana efektif mengaplikasikan metodologi penelitian sejarah.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan disiplin intelektual terutama dalam bidang sejarah.
- d. Menambah dan memperkaya karya sejarah terutama dalam bidang sejarah Indonesia.

## **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui peran Mayjend Soeharto menyangkut peristiwa 30 September 1965 sampai diangkat menjadi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) sekaligus Panglima Angkatan Darat.
- b. Mengetahui strategi yang dilakukan oleh Soeharto sampai pada akhirnya beliau berhasil menduduki kursi kepresidenan.
- c. Mengetahui peranan Amerika Serikat (CIA) dalam karier politik Soeharto dalam upayanya menduduki kursi kepresidenan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, sebagai berikut.

- a. Pembaca dapat memperoleh tambahan wawasan dan ilmu yang berguna kelak sebagai seorang calon sejarawan pendidik serta mengembangkan keterampilan dalam menyusun suatu karya ilmiah.
- b. Pembaca dapat memperoleh tambahan referensi, informasi, dan pengetahuan mengenai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap karier politik Soeharto hingga beliau menjabat sebagai Presiden
- c. Pembaca dapat memperoleh tambahan wawasan dan pengetahuan yang berguna sehingga dapat menilai peristiwa yang terjadi di Indonesia

pada kurun waktu sekitar tahun 1965-1967 secara lebih obyektif dalam upayanya meluruskan Sejarah Indonesia.

## **E. Kajian Pustaka**

### **1. Politik dan Perubahan Politik**

Istilah politik berasal dari bahasa Yunani ... *polis* yang berarti Negara atau lebih tepatnya negara kota". Menurut *The Encyclopedia Americana: International Edition*, politik dalam pelaksanaannya terkait dengan filosofi politik bahwa politik merupakan serangkaian kegiatan yang memerlukan pemeriksaan dan penilaian sejauh mana kepercayaan rakyat masih diberikan kepada pengusaha untuk melaksanakan tujuan umum masyarakat.

Sekurang-kurangnya ada lima pandangan mengenai politik. Pertama, politik merupakan usaha-usaha yang ditempuh warga Negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, politik sebagai konflik dalam

rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.<sup>8</sup>

Politik ialah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.<sup>9</sup> Secara umum, politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistim politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistim itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.<sup>10</sup>

Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila Jilid V menjelaskan bahwa politik terkait dengan seni mengatur dan mengurus Negara dan ilmu kenegaraan. Hal ini mencakup semua kebijakan atau tindakan ambil bagian dalam urusan kenegaraan atau pemerintahan termasuk menyangkut penetapan bentuk, tugas, dan lingkup urusan negara. Politik berhubungan dengan kekuasaan, sehingga politik adalah usaha yang semata-mata membina dan menggunakan kekuasaan. Teknik menghimpun kekuasaan disebut berpolitik. Politik merupakan perjuangan untuk memperoleh kekuasaan, teknik menjalankan kekuasaan, masalah-

---

<sup>8</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992, hlm. 1-2.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.10.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.8.

masalah pelaksanaan/kontrol kekuasaan, dan pembentukan/penggunaan kekuasaan.<sup>11</sup>

Ada beberapa konsep pokok dalam politik, diantaranya politik mengandung konsep-konsep pokok, yaitu Negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decisionmaking*), kebijaksanaan (*policy, heleid*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*). Politik terkait dengan Negara karena ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara. Hubungannya dengan kekuasaan bahwa ilmu politik memusatkan perhatiannya pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Politik juga mengandung konsep pengambilan keputusan melalui sarana umum. Objek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya, sehingga ilmu politik mengandung konsep studi mengenai terbentuknya kebijakan umum. Pembagian atau alokasi dalam politik berarti keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama rakyat.<sup>12</sup>

Wujud dari politik suatu negara terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pada umumnya, politik mencakup beraneka macam kegiatan dalam suatu sistim masyarakat yang terorganisasikan (terutama negara) menyangkut pengambilan keputusan (*decision making*) baik mengenai

---

<sup>11</sup> Isjwara F, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Penerbit Binacipta, 1996, hlm. 42.

<sup>12</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Penerbit-Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 9-14.

tujuan-tujuan dari sistim itu sendiri maupun mengenai pelaksanaannya. Pengambilan keputusan menyangkut beraneka kebijaksanaan (*policy*) umum maupun konkret. Untuk pelaksanaannya diperlukan kekuasaan (*power*) dan wewenang (*authority*), yang dalam pertentangan kepentingan-kepentingan dapat memakai cara mnyakinkan (*persuasion*) atau paksaan (*coercion*).

Sehubungan dengan itu, pelaksanaan kebijakan negara perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) dari sumber-sumber yang ada. Disamping itu perlu dimiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang akan dipakai untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini.<sup>13</sup>

Pelaksanaan politik dalam suatu negara tidak lepas dari aspek-aspek politik. Dijelaskan bahwa politik mengandung empat aspek, yaitu perilaku politik pemerintah dan masyarakat (interaksi), kemampuan mengikat yang dimiliki setiap keputusan politik, keputusan untuk masyarakat umum (demi kebaikan bersama dan unit politik), dan konflik, konsensus, dan perubahan.<sup>14</sup>

Pelaksanaan kehidupan politik dalam suatu negara akan selalu mengalami perubahan. Perubahan politik adalah mencakup semua ciri pembangunan dan modernisasi politik, termasuk perubahan yang terjadi tanpa

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>14</sup> Surbakti, *op.cit.*, hlm. 15.

rencana, berlangsung secara cepat, tiba-tiba, dan mengandung kekerasan, menimbulkan akibat-akibat yang tak diduga dan menuju kemunduran. Lebih lanjut dikatakan bahwa objek perubahan politik meliputi sistim nilai politik, struktur kekuasaan, strategi menangani permasalahan kebijakan umum dan lingkungan masyarakat (kondisi-kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi) dan fisik (sumber alam) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistim politik.<sup>15</sup>

Perubahan politik dapat dibedakan menjadi tiga. Pertama, perubahan sistim ialah perubahan yang bersifat radikal (perubahan sampai ke akar-akarnya). Perubahan sistim dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan progresif merupakan perubahan yang dimotori oleh kelompok revolusioner, dan perubahan retrogresif dimotori oleh sekelompok reaksioner. Kedua, perubahan dalam proses politik yang menyebabkan terjadinya sejumlah modifikasi dalam ketiga elemen sistim politik merupakan perubahan didalam sistim. Perubahan kepemimpinan dapat terjadi secara damai melalui proses pemilihan umum, turun-temurun misalnya dalam sistim kerajaan, dan karena paksaan (*kudeta/coup de'etat*). Perubahan isi kebijakan dapat terjadi karena perubahan kepemimpinan, tetapi tidak jarang terjadi karena demonstrasi dan huru-hara (*riot*). Perubahan yang ketiga berkaitan dengan dampak berbagai kebijakan pemerintah terhadap lingkungan masyarakat dan lingkungan fisik. Termasuk juga sejauh mana kebijakan pemerintah yang tidak saja mampu mengolah dan mendayagunakan sumber alam, tetapi juga mampu melestarikannya.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 246-247.

Perubahan politik berkaitan dengan kepemimpinan, bisa terjadi perubahan seluruh pemimpin pemerintahan, perubahan sebagian pemimpin pemerintahan, dan tidak mengalami perubahan pemimpin namun ada perubahan kebijakan. Penyebab terjadinya perubahan politik ada dua faktor yaitu konflik kepentingan dan gagasan. Konflik yang berupa ketegangan cenderung menimbulkan perubahan di dalam sistem dan dampak kebijakan yang bersifat moderat, sedangkan konflik yang berupa kontradiksi cenderung menggoyahkan keseimbangan sistem dan dampak kebijakan yang bersifat mendasar. Gagasan dan nilai-nilai sebagai variabel yang independen menjelaskan perbedaan antara sistem sosial dan proses-proses perubahan dan reproduksi. Nilai-nilai tidak hanya menghasilkan dinamisme dan kemajuan, tetapi juga stagnasi dalam masyarakat.

Dampak dari perubahan politik bagi negara bisa menuju pada situasi negara yang lebih baik daripada sebelumnya (bersifat progresif), namun bisa pula menuju situasi negara yang lebih buruk daripada sebelumnya (bersifat regresif). Situasi negara menjadi lebih baik apabila perubahan politik yang terjadi sesuai dengan kehendak masyarakat, sehingga tercipta suasana yang kondusif dan kestabilan politik. Kestabilan politik akan mendukung upaya pembangunan negara, tetapi apabila perubahan politik yang terjadi tidak membawa aspirasi rakyat, maka situasi negara justru akan lebih buruk daripada sebelumnya karena tuntutan perubahan akan lebih kuat.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 237.

Perubahan politik tidak bisa lepas dari partisipasi masyarakat. Perubahan politik bisa berakibat pada perubahan aspirasi, pola konflik, dan pola hubungan kerja sama dalam masyarakat.<sup>17</sup> Dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia, beberapa kali telah terjadi perubahan politik. Salah satunya yaitu runtuhnya kekuasaan Soekarno dengan Orde Lamanya dan munculnya tatanan kehidupan pemerintah yang baru yaitu Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Perubahan politik ini juga membawa pemikiran politik yang baru di Indonesia, secara khusus telah menyingkirkan pemikiran politik Komunisme dengan dikeluarkannya Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan terhadap ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

## **2. Partisipasi dan Karier Politik**

Karier politik erat kaitannya dengan partisipasi politik. Hal ini dikarenakan karier politik seseorang beranjak dari usaha partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>18</sup> Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik: Suatu Pengantar di dalam Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai* (Ed. Miriam Budiardjo), Jakarta: Penerbit Gramedia, 1982, hlm. 1.

Norman H. Nie dan Sidney Verba menjelaskan bahwa “partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka”. Partisipasi politik adalah kegiatan kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Dari pengertian ini, salah satu yang penting adalah adanya kegiatan dari warga negara atau lebih tepatnya individu-individu dalam peranan mereka sebagai warga negara. Dengan demikian ada perbedaan antara partisipan politik dengan orang yang profesional dalam bidang politik. Walaupun juga tidak menutup kemungkinan bagi partisipan politik akhirnya menjadi profesional dalam bidang politik.

Menurut *The Encyclopedia Americana: International Edition*, partisipasi politik secara umum dapat disalurkan melalui partai politik. Keterlibatan dalam partai politik dapat diawali dengan menjadi simpatisan partai politik. Keaktifan seseorang dalam suatu partai memberi kesempatan menjadi anggota aktif partai. Kedudukan yang tinggi dalam kepartaian akan meningkatkan partisipasi politik seseorang pada taraf politik kenegaraan secara nasional.

Dengan demikian, partisipasi politik menjadi kegiatan awal seseorang untuk memasuki karier politiknya. Karier menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, atau pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju”. Jadi dapat disimpulkan bahwa karier politik adalah perkembangan atau kemajuan dalam kegiatan politik yang berarti pula kemajuan dalam partisipasi politik (perluasan partisipasi politik).

Bentuk partisipasi politik yang bermuara pada karier politik dapat dilakukan melalui sarana partai politik, seseorang dapat memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakannya.<sup>19</sup> Dari situlah karier politik seseorang dimulai. Berawal dari kegiatan memilih dalam pemilihan umum, menghadiri kegiatan diskusi-diskusi politik, menjadi anggota aktif dalam kegiatan partai politik, berkampanye, hingga duduk dalam lembaga politik.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dibagi dalam bentuk yang sempit hingga kemudian meluas. Bentuk perluasan partisipasi politik diawali dari (1) kegiatan pemilihan, berupa pemberian suara dalam pemilihan umum, (2) *lobbying*, mencakup upaya perorangan atau kelompok menghubungi pejabat pemerintah/pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan pemerintah, (3) kegiatan organisasi, menyangkut peran warga negara dalam suatu organisasi dengan tujuan utama mempengaruhi pengambilan keputusan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

pemerintah, (4) tindakan kekerasan, merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang tidak terbendung lagi sebagai upaya mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Misalnya mengubah pimpinan politik melalui kudeta atau pembunuhan atau mengubah seluruh sistem politik dan kebijakan pemerintah. Bentuk partisipasi politik yang terakhir ini dapat membawa perubahan politik yang besar karena telah mengarah pada upaya merebut kekuasaan.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, elit politik yang tidak berkuasa lebih cenderung untuk menaruh minat terhadap perluasan partisipasi politik, mengubah dasar-dasarnya dan kadang-kadang mengembangkan bentuk-bentuk partisipasi yang baru. Penampilan tokoh-tokoh baru dalam gelanggang politik merupakan upaya yang klasik untuk mengubah perimbangan kekuasaan dalam gelanggang politik itu. Namun kemampuan elit politik yang tidak menguasai pemerintahan untuk melaksanakan hal itu biasanya terbatas. Pengaruh yang lebih menentukan terhadap partisipasi politik berasal dari pihak elit-elit yang mampu menguasai bidang atau sumber daya pemerintah. Sebelum meletusnya Gerakan 30 September 1965, Soeharto sebagai Pangkostrad tidak terlalu berarti dalam gelanggang politik nasional. Setelah Soeharto diangkat sebagai Pangkopkamtib, Soeharto muncul sebagai elit politik baru yang mampu menguasai dan memulihkan keamanan nasional yang berpengaruh besar terhadap pemerintahan Soekarno yang berkuasa pada waktu itu. Sejak itulah awal bagi dimulainya karier politik Soeharto.

### 3. Kekuasaan dan Peralihan Kekuasaan

Kekuasaan berarti kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan.<sup>20</sup> Apabila melihat kekuasaan sebagai inti dari politik, maka semua kegiatan yang menyangkut masalah merebutkan dan mempertahankan kekuasaan disebut berpolitik. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan (*power struggle*) mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Politik memang tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan. Gejala kekuasaan merupakan gejala yang lumrah terdapat dalam setiap masyarakat, dalam semua bentuk hidup bersama.

Kekuasaan dianggap sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.<sup>21</sup> Kekuasaan adalah pengaruh atau pengawasan atas pengambilan keputusan-keputusan yang berwenang (*authoritative*).<sup>22</sup> Kekuasaan hendaknya diberi makna secara netral. Artinya kekuasaan itu tidak dilihat

---

<sup>20</sup> Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, op.cit.*, hlm. 35.

<sup>21</sup> Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 103.

<sup>22</sup> Soelaeman Soemardi, *Cara-cara Pendekatan terhadap Kekuasaan sebagai Suatu Gejala Sosial di dalam aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa* (Ed. Miriam Budiardjo), Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1984, hlm. 33.

sebagai sesuatu yang baik atau yang buruk, tetapi baik buruknya bergantung kepada etiket orang tua/lembaga yang memegang kekuasaan itu. Kekuasaan harus ada dalam penyelenggaraan kehidupan politik, karena hanya dengan kekuasaan dari suatu sistim politik akan muncul suatu kebijaksanaan yang dapat mengikat seluruh warga masyarakat.<sup>23</sup>

Hakikat kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Kekuasaan dilihat sebagai interaksi antara pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi, atau yang satu mempengaruhi dan yang lain mematuhi.<sup>24</sup> Manusia adalah pencipta kekuasaan sekaligus sasaran kekuasaan. Manusia menjadi subjek kekuasaan, yaitu mereka yang melaksanakan kekuasaan, dan sekaligus objek kekuasaan, yaitu mereka yang menjadi sasaran pelaksanaan kekuasaan dan takluk pada kekuasaan tersebut.<sup>25</sup> Oleh karena itu, Kekuasaan berbentuk hubungan (relationship), bahwa ada pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah (the ruler and the ruled).

Bentuk atau wujud kekuasaan berupa *Influence* ialah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. *Persuasion* ialah kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. *Manipulasi* yaitu menggunakan

---

<sup>23</sup> Sudjiono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1995, hlm. 109.

<sup>24</sup> Surbakti, *op.cit.*, hlm. 6.

<sup>25</sup> Isjwara F, *op.cit.*, hlm. 53.

pengaruh, dalam hal ini yang dipengaruhi tidak menyadari bahwa tingkah lakunya sebenarnya mematuhi keinginan pemegang kekuasaan. *Coercion* ialah peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pihak pemilik kekuasaan. *Force* ialah penggunaan tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis terhadap pihak lain agar melakukan sesuatu, dan *Authority* yaitu kewenangan.<sup>26</sup>

Salah satu jenis kekuasaan adalah kekuasaan politik, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri.<sup>27</sup> Kekuasaan politik mencakup ketaatan masyarakat, pengendalian orang lain dengan tujuan mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara di bidang administratif, legislatif, dan yudikatif. Untuk menggunakan kekuasaan politik yang ada, harus ada penguasa yaitu pelaku yang memegang kekuasaan, dan harus ada alat/sarana kekuasaan.

Kekuasaan politik hanyalah sebagian dari kekuasaan sosial yang titik sasarannya ditujukan kepada negara sebagai satu-satunya pihak yang memiliki wewenang dan sekaligus memiliki hak untuk mengendalikan tingkah laku seseorang melalui cara-cara tertentu dan dengan paksaan sekalipun. Kekuasaan politik tidak saja mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan

---

<sup>26</sup> Surbakti, *op.cit.*, hlm. 57.

<sup>27</sup> Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, op.cit.*, hlm. 38.

dari warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara di bidang administrasi, legislatif, dan yudikatif.<sup>28</sup>

Kekuasaan politik dibedakan menjadi dua macam, yaitu bagian dari kekuasaan sosial yang (khususnya) terwujud dalam negara (kekuasaan negara atau *state power*), seperti lembaga-lembaga pemerintahan DPR, dan Presiden dan bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara, yang dimaksudkan yaitu aliran-aliran dan asosiasi yang bersifat politik (misalnya partai politik), maupun yang pada dasarnya tidak menyelenggarakan kegiatan politik, namun pada saat-saat tertentu mempengaruhi jalannya pemerintahan, seperti organisasi ekonomi, organisasi mahasiswa, organisasi agama, dan organisasi minoritas.<sup>29</sup> Kekuasaan politik memiliki enam dimensi yaitu:

- a. Potensial dan aktual; potensial yaitu bila seseorang memiliki sumber-sumber kekuasaan seperti kekayaan, tanah, senjata, pengetahuan/informasi, popularitas, status sosial yang tinggi, massa yang terorganisir, dan jabatan. Aktual bila dia telah menggunakan sumber-sumber tersebut ke dalam kegiatan politik secara efektif untuk mencapai tujuan.
- b. Konsensus dan paksaan; konsensus berarti kekuasaan diperoleh melalui persetujuan secara sadar dari pihak yang dipengaruhi. Kekuasaan

---

<sup>28</sup> Sastroatmodjo, *op.cit.*, hlm. 148.

<sup>29</sup> Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, loc.cit.*

berdasarkan paksaan, bisa berupa paksaan fisik, sarana ekonomi, dan sarana psikologi.

- c. Jabatan dan pribadi; dalam masyarakat maju, kekuasaan tergantung pada jabatan yang disandangnya. Berbeda dalam masyarakat sederhana, kekuasaan yang terkandung dalam kualitas pribadi lebih menonjol, seperti charisma, penampilan diri, asal-usul, dan wahyu.
- d. Positif dan negatif; kekuasaan positif ialah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencapai tujuan dipandang penting dan harus. Kekuasaan negatif ialah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencegah pihak lain mencapai tujuannya yang tidak hanya dipandang tidak perlu, tetapi juga merugikan pihaknya.
- e. Implisit dan eksplisit; kekuasaan implisit ialah pengaruh yang tidak dapat dilihat, tetapi bisa dirasakan, sedangkan kekuasaan eksplisit ialah pengaruh yang secara jelas terlihat dan terasakan.
- f. Langsung dan tidak langsung; kekuasaan langsung ialah penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik dengan melakukan hubungan secara langsung, tanpa perantara. Kekuasaan tidak langsung ialah penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik melalui perantara pihak lain yang diperkirakan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pembuat dan pelaksana keputusan politik.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Surbakti, *op.cit.*, hlm. 60-63.

Kaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan politik terdapat empat faktor yang perlu dikaji. Keempat faktor ini meliputi bentuk dan jumlah sumber kekuasaan, distribusi sumber kekuasaan, kapan penggunaan sumber kekuasaan, dan hasil penggunaan sumber kekuasaan. Pertama, sumber kekuasaan ialah sarana paksaan fisik, kekayaan dan harta benda (ekonomi), normatif, jabatan, keahlian, informasi, status sosial, popularitas pribadi, dan massa yang terorganisir. Ada pula sumber kekuasaan lain yang berfungsi sebagai pelengkap, artinya sumber kekuasaan utama akan dapat digunakan apabila sumber pelengkap itu ada. Sebaliknya, sumber pelengkap tidak ada artinya tanpa sumber kekuasaan utama. Sumber kekuasaan pelengkap itu meliputi waktu, ketrampilan, dan minat atau perhatian pada proses politik. Kedua, distribusi sumber kekuasaan berarti adanya keseimbangan pemilikan dan/atau penguasaan sumber-sumber kekuasaan. Sumber-sumber kekuasaan tidak pernah terdistribusikan secara merata dalam setiap masyarakat atau sistem politik, karena kemampuan setiap orang bervariasi. Ketiga, kekuasaan aktual terletak pada penggunaan sumber-sumber secara efektif untuk mempengaruhi proses politik. Dalam menggunakan sumber kekuasaan untuk mempengaruhi proses politik ditentukan oleh kuatnya motivasi untuk mencapai suatu tujuan, harapan akan keberhasilan mencapai tujuan, persepsi mengenai biaya dan risiko yang timbul dalam mencapai tujuan, dan pengetahuan mengenai cara-cara mencapai tujuan tersebut. Keempat, hasil penggunaan sumber kekuasaan ialah seberapa banyak jumlah individu yang dapat dikendalikan oleh pemegang kekuasaan, sector-sector kehidupan yang

dikendalikan oleh pemegang kekuasaan dan kedalaman pengaruh kekuasaan terhadap individu dan masyarakat.

Kekuasaan mengandung unsur kewenangan, namun tidak selalu kekuasaan berupa kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Kewenangan untuk memerintah bisa berasal dari banyak sumber, diantaranya Pertama, hak memerintah berasal dari tradisi. Artinya, kepercayaan yang telah berakar dipelihara secara terus-menerus dalam masyarakat. Kedua, hak memerintah berasal dari Tuhan, dewa, atau wahyu. Atas dasar itu, hak memerintah dianggap bersifat sakral. Ketiga, hak memerintah berasal dari kualitas pribadi sang pemimpin, baik penampilannya yang agung dan diri pribadinya yang populer maupun karena memiliki kharisma. Keempat, hak memerintah masyarakat berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat menjadi pemimpin pemerintahan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain konstitusi, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Kelima, hak memerintah berasal dari sumber yang bersifat instrumental, seperti keahlian dan kekayaan.<sup>31</sup> Kelima sumber kewenangan tersebut disimpulkan menjadi dua tipe kewenangan utama, yaitu kewenangan yang bersifat prosedural dan kewenangan yang bersifat substansial.

Kekuasaan dan kewenangan membutuhkan legitimasi. Konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan,

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 85-88.

menerima atau menolak hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. Ada empat tipe kadar legitimasi, yaitu pralegitimasi, berlegitimasi, tak berlegitimasi, dan pascalegitimasi. Suatu hubungan kewenangan disebut sebagai pralegitimasi apabila pihak yang memerintah sangat yakin memiliki hak moral untuk memerintah masyarakat. Kewenangan yang tak berlegitimasi ialah hubungan kewenangan tatkala pihak yang diperintah tidak mengakui hak moral penguasa untuk memerintah, sedangkan pihak yang memerintah secara terus-menerus mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara yang bercorak kekerasan. Kewenangan yang berlegitimasi ialah yang diperintah mengakui dan mendukung hak moral penguasa untuk memerintah. Kewenangan pascalegitimasi ialah dasar legitimasi yang lama dianggap tidak sesuai lagi dengan aspirasi masyarakat dan telah muncul dasar legitimasi baru yang menghendaki suatu kewenangan atas dasar yang baru tersebut. Pergantian pemerintahan karena perubahan dasar legitimasi acap kali berlangsung dengan kekerasan seperti kudeta dan revolusi.

Jabatan bersifat relatif tetap, sedangkan orang yang memegang dan menjalankan fungsi (tugas dan kewenangan) jabatan bersifat tidak tetap. Hal ini disebabkan umur manusia yang terbatas, kemampuan dan kearifan manusia juga terbatas. Semakin lama seseorang memegang suatu jabatan, semakin menanggapi dan memperlakukan jabatan sebagai milik pribadinya, akibatnya cenderung menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Peralihan kewenangan merupakan suatu keharusan.

Ada beberapa cara peralihan kewenangan, diungkapkan oleh Paul Conn bahwa secara umum terdapat tiga cara peralihan kewenangan, yakni secara turun-temurun, pemilihan, dan paksaan. Yang dimaksud dengan peralihan kewenangan secara turun-temurun, ialah jabatan dan kewenangan dialihkan kepada keturunan atau keluarga pemegang jabatan terdahulu. Hal ini terjadi dalam sistim politik otokrasi tradisional, seperti kerajaan dan kesultanan. Peralihan kewenangan dengan pemilihan dapat dilakukan secara langsung dalam sistim politik demokrasi. Peralihan kewenangan secara paksaan ialah jabatan dan kewenangan terpaksa dialihkan kepada orang atau kelompok lain tidak menurut prosedur yang sudah disepakati, melainkan menggunakan kekerasan, seperti revolusi dan kudeta, dan ancaman kekerasan (paksaan tak berdarah).

Terkait dengan kudeta, dapat dibedakan antara *putsch* (biasanya terjadi pada saat perang dingin atau pasca perang), *pronunciamento* (kudeta militer ala Spanyol/Amerika Latin) dengan *coup d'Etat* (kudeta). Yang pertama dilakukan satu faksi angkatan darat, yang kedua oleh seluruh tentara, sedangkan yang terakhir selain militer bisa juga melibatkan warga sipil.<sup>32</sup> Kudeta membutuhkan bantuan intervensi massa/kekuatan bersenjata yang besar. Kudeta terjadi dari infiltrasi kedalam suatu segmen apparatus negara yang kecil tetapi menentukan, yang kemudian digunakan untuk mengambil alih pemerintah dari kendali unsur-unsur lainnya. Kondisi yang cocok bagi terjadinya kudeta yaitu krisis ekonomi berkepanjangan yang diikuti

---

<sup>32</sup> Asvi Warman Adam, *op.cit.*, hlm. 137.

pengangguran besar-besaran, perang yang lama atau kekalahan besar dalam bidang militer/diplomatik, dan instabilitas kronis di bawah sistim multipartai.

Peralihan kekuasaan negara dapat disebut juga sebagai suksesi kepemimpinan nasional. Kata suksesi mengandung dua makna, yaitu yang pertama bahwa suksesi berarti penggantian atau regenerasi, tetapi lebih ditekankan di lingkungan pimpinan tinggi negara. Makna kedua, sebagai proses pergantian kepemimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>33</sup>

Jalannya suksesi kepemimpinan nasional dapat diukur sebagai suksesi kepemimpinan nasional substansial dan non substansial. Suksesi substansial berarti pemimpin nasional lama benar-benar menyerahkan kekuasaan yang ada padanya kepada pemimpin yang baru. Sedangkan suksesi non substansial berarti pemimpin lama masih menyisakan sebagian kekuasaan yang dimilikinya, sehingga dibalik kekuasaan pemimpin baru masih menyembul kekuasaan pemimpin lama.<sup>34</sup> Misalnya peralihan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto bersifat non substansial karena meskipun Soeharto diberi kekuasaan eksekutif melalui Pengumuman Presiden Tanggal 20 Februari 1967 tentang penyerahan kekuasaan pemerintahan, Soekarno masih memegang kekuasaan puncak eksekutif secara *de jure*, sehingga pada saat itu terjadi dualisme

---

<sup>33</sup> Subhan S. D, *Suksesi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm. 3.

<sup>34</sup> Eep Saefullah Fatah R, *Suksesi Kepemimpinan Nasional dalam Kerangka Demokratisasi (Jurnal Ilmu Politik)*, Jakarta: Penerbit kerjasama Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 54-55.

kepemimpinan nasional. Suksesi non substansial ini berubah menjadi substansial tatkala Sidang Umum MPRS memindahkan seluruh perangkat kekuasaan Soekarno kepada Soeharto melalui Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto menjadi pejabat presiden.

#### **F. Historiografi yang Relevan**

Pengkajian suatu peristiwa masa lampau memerlukan sumber sebagai modal dasar terciptanya karya tulis. Historiografi yang relevan merupakan kajian-kajian historis yang mendahului penelitian dengan tema atau topik yang hampir sama. Hal ini berfungsi sebagai pembeda antar penelitian, sekaligus sebagai bentuk penunjukan orisinalitas tiap-tiap peneliti.<sup>35</sup> Setiap sejarawan memiliki penafsiran yang berbeda, meskipun fakta atau sumber yang digunakan oleh para peneliti sama.

Historiografi yang relevan adalah rekonstruksi imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman atau peninggalan masa lampau.<sup>36</sup> Sebagai bagian dari proses untuk merekonstruksi masa lampau, peranan hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan

---

<sup>35</sup> Jurusan Pendidikan Sejarah, *Pedoman penulisan Tugas Akhir Skripsi*, Jurusan Pendidikan Sejarah FISE UNY, Yogyakarta, 2006, hlm. 3.

<sup>36</sup> Louis Gottschalk, "Understanding History: A Prime of History Method". a.b. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm.35.

dilakukan adalah sangat penting untuk dilakukan. Hasil penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian sejarah itu dinamakan dengan historiografi yang relevan, atau dengan kata lain historiografi yang relevan berfungsi untuk membantu dalam merekonstruksi sejarah yaitu sebagai sumber referensi maupun perbandingan sehingga diharapkan sejarawan mampu menekan unsur subyektivitas dalam penelitiannya.

Sumber yang digunakan, beberapa diantaranya berkaitan dengan topik penelitian berikut ini.

Artikel karangan Peter Dale Scott yang berjudul Amerika Serikat dan Penggulingan Soekarno 1965-1967, yang diterbitkan oleh Vision 03 PT Perspektif Media Komunikasi di Jakarta tahun 2008. Dalam artikel ini, menjelaskan tentang campur tangan Amerika Serikat di Indonesia dengan membantu dalam proses Gestapu yang berusaha menggulingkan Presiden Soekarno dengan alasan memblokir pengaruh Komunis di Indonesia.

Kemudian ada paper yang berjudul Konspirasi Soeharto-CIA: Penggulingan Soekarno 1965-1967 karangan Peter Dale Scott yang diterbitkan oleh PMII Unair & Pekad (Perkumpulan Kebangsaan Anti Diskriminatif) tahun 1988. Paper singkat dari Peter Dale Scott, Profesor dari Universitas California, Barkeley ini membahas bagaimana keterlibatan Amerika Serikat dalam upaya penggulingan Soekarno secara kotor dan berdarah. Tulisan ini begitu penting karena sejarah seputar peristiwa “Gerakan 30 September” (Gestapu) banyak yang disembunyikan, dihilangkan

dan diputarbalikkan oleh rezim Orde Baru. Pembantaian terhadap sekutu-sekutu Soekarno yang beraliran kiri merupakan hasil dari konspirasi CIA-Soeharto dibantu oleh intelijen Inggris, Jepang, dan Jerman.

Kemudian dokumen CIA yang diterbitkan di Indonesia oleh Redaksi Hasta Mutra tahun 2002 yang berjudul *Foreign Relations of the United-States, 1964-1968: Volume XXVI: Dokumen CIA-Melacak Penggulingan Soekarno dan Konspirasi G30S-1965*. Dokumen ini terbitan asli dari Washington: United States Government Printing Office. Dokumen ini berisi mengenai keterlibatan CIA dalam penggulingan Presiden Soekarno pada tahun 1965.

Skripsi yang berjudul *Dukungan Amerika Serikat terhadap Karier Politik Soeharto Suatu Kajian Sejarah Politik Penggulingan Soekarno 1965-1967* ini akan memuat tentang alasan Amerika Serikat ikut terlibat dalam membantu Soeharto dalam upayanya menjadi Presiden menggantikan Soekarno hingga langkah-langkah yang ditempuh oleh Amerika Serikat guna mencapai tujuannya.

## **G. Metode dan Pendekatan Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang artinya cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut pula cara kerja, yaitu cara kerja untuk

memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>37</sup> Menurut Kamus *The New Lexicon Webster's Dictionary of the English Language*, metode ialah suatu cara untuk berbuat sesuatu; suatu prosedur untuk mengerjakan sesuatu; keteraturan dalam berbuat, berencana, dan lain-lain; suatu susunan atau sistim yang teratur.<sup>38</sup> Jadi metode ada hubungannya dengan suatu prosedur, proses, atau teknik yang sistematis dalam penyidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan) yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode historis, karena objek kajiannya berupa peristiwa masa lampau. Metode historis berarti seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.<sup>39</sup> Metode historis dapat juga berarti sebagai proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>40</sup>

Tujuan penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan,

---

<sup>37</sup> Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Jakarta: Sinar Grafika, 1983, hlm. 16.

<sup>38</sup> Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik, 1994, hlm. 2.

<sup>39</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 43.

<sup>40</sup> Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 32.

mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.<sup>41</sup> Tahap-tahap penelitian historis meliputi heuristik (pelacakan dan pengumpulan sumber-sumber sejarah), melakukan kritik eksternal dan internal, melakukan penafsiran atau interpretasi, dan penulisan sejarah atau historiografi.<sup>42</sup>

Sumber sejarah disebut juga data sejarah; bahasa Inggris *datum* bentuk tunggal, *data* bentuk jamak; bahasa Latin *datum* berarti pemberian.<sup>43</sup> Sumber sejarah ialah segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung menceritakan kepada kita tentang sesuatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lampau (*past actuality*).<sup>44</sup>

Sumber sejarah dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu (1) sumber lisan yang merupakan sumber tradisional dalam pengertian luas; (2) sumber tulisan yang mempunyai fungsi mutlak dalam sejarah; dan (3)

---

<sup>41</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 16.

<sup>42</sup> Helius Sjamsuddin dan H. Ismaun, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik, 1993, hlm. 22.

<sup>43</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995, hlm. 94.

<sup>44</sup> Helius Sjamsuddin, *op.cit.*, hlm. 73.

sumber visual yaitu benda kebudayaan atau warisan masa lampau yang berbentuk dan berupa.<sup>45</sup>

Menurut bahannya, sumber sejarah dapat dibagi menjadi dua yaitu tertulis dan tidak tertulis atau dokumen dan *artifact* (artefak). Sedangkan menurut penyampaiannya dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer apabila disampaikan oleh saksi mata. Sumber sekunder ialah yang disampaikan oleh yang bukan saksi mata, misalnya buku-buku.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan data yang berupa sumber pustaka. Sumber pustaka tersebut berupa kumpulan dokumen-dokumen dan buku-buku yang diperoleh dari perpustakaan maupun koleksi pribadi dan perseorangan. Sumber primer yang digunakan yaitu kumpulan dokumen berupa arsip, memorandum, dan telegram yang terkait dengan peristiwa seputar jatuhnya kekuasaan Soekarno. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku literatur yang relevan dengan penelitian yang ditulis oleh pelaku maupun saksi peristiwa sejarah dan pengamat yang berusaha merekonstruksi peristiwa sejarah tersebut.

Sebelum melakukan penelitian, perlu adanya prosedur penelitian terlebih dahulu karena dapat mempermudah cara kerja dan memperlancar jalannya proses penelitian. Penelitian ini menggunakan metode historis,

---

<sup>45</sup> Sidi Gazalba, *Pengantar Sedjarah sebagai Ilmu*, Djakarta: Bhratara, 1966, hlm. 89-93.

<sup>46</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 96.

sehingga prosedur penelitian yang harus dilalui meliputi empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

### 1. *Heuristik*

Heuristik adalah kegiatan mengumpulkan jejak-jejak peristiwa sejarah atau kegiatan mencari sumber sejarah. Heuristik berasal dari bahasa Yunani *heurishein* yang artinya memperoleh.<sup>47</sup>

Pada tahap ini dilakukan pencarian dan pengumpulan sumber-sumber yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dengan studi kepustakaan.

Sumber primer berupa Dokumen Terpilih Sekitar G30S/PKI yang disunting oleh Alex Dinuth terbitan Intermasa, Kumpulan Dokumen CIA Melacak Penggulingan Sukarno dan Konspirasi G30S 1965 yang disunting oleh Joesoef Isak terbitan Hasta Mutra, dan kumpulan Surat-surat Pribadi Soedjatmoko kepada Presiden (Jenderal) Soeharto 16 Juni 1968-26 April 1971 diperoleh dari koleksi pribadi. Sedangkan sumber sekunder berupa buku-buku literatur, misalnya buku tulisan Peter Dale Scott, Harold Crouch, Ulf Sundhaussen, Willem Oltmans, Baskara T. Wardaya, dan Dr. Asvi Warman Adam merupakan koleksi pribadi yang dibeli di beberapa toko buku di Yogyakarta dan hasil dari penelusuran di berbagai perpustakaan.

---

<sup>47</sup> Dudung Abdurrahman, *op.cit.*, hlm. 55.

## 2. Kritik

Setelah sumber yang diperlukan terkumpul, maka langkah berikutnya adalah melakukan kritik sumber yang menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dan keaslian dari sumber itu yang meliputi kritik ekstern dan intern.<sup>48</sup>

Kritik ekstern ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah berupa suatu penelitian atas asal-usul sumber untuk mendapatkan informasi apakah sumber tersebut telah diubah atau tetap. Fungsi kritik ekstern ialah memeriksa sumber sejarah dan menegakkan otentisitas dan integritas dari sumber.<sup>49</sup>

Dalam penelitian ini, kritik ekstern dilakukan dengan cara melihat tahun pembuatan (dokumen), ejaan dan gaya bahasa, dan yang mengeluarkan atau menerbitkan sumber. Kumpulan Dokumen CIA yang dipublikasikan oleh Amerika Serikat dan Dokumen sekitar Gerakan 30 September 1965 menggunakan tanggal-tanggal yang sezaman dengan peristiwa sekitar penggulingan Soekarno. Sumber berupa kumpulan hasil wawancara dan kesaksian dari nara sumber yang menjadi pelaku ataupun saksi mata dalam peristiwa tersebut, juga menunjukkan otentiknya sumber tersebut, meskipun ejaan, dan

---

<sup>48</sup> Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah, op.cit.*, hlm. 104.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

hurufnya sudah disesuaikan dengan tahun terbitnya. Perlu diketahui, baik sumber primer maupun sekunder kebanyakan diterbitkan setelah tumbangnya Orde Baru atau pada zaman Reformasi karena otoritas Orde Baru melarang tulisan-tulisan yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pada masa itu.

### 3. *Interpretasi*

Tahap selanjutnya adalah interpretasi, yaitu berupa analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan) fakta-fakta sejarah. Hal ini dilakukan agar fakta-fakta yang tampaknya terlepas antara satu sama lain bisa menjadi satu hubungan yang saling berkaitan. Dengan demikian, interpretasi dapat dikatakan sebagai proses memaknai fakta-fakta sejarah. Data atau sumber sejarah yang dikritik akan menghasilkan fakta yang akan digunakan dalam penulisan sejarah. Namun demikian, sejarah itu sendiri bukanlah kumpulan dari fakta, parade tokoh, kronologis peristiwa, atau deskripsi belaka yang apabila dibaca akan terasa kering karena kurang mempunyai makna.

Fakta-fakta sejarah harus diinterpretasikan atau ditafsirkan agar suatu peristiwa dapat direkonstruksikan dengan baik, yakni dengan jalan menyeleksi, menyusun, mengurangi tekanan, dan menempatkan fakta dalam urutan kausal. Dengan demikian, tidak hanya pertanyaan dimana, siapa, bilamana, dan apa yang perlu dijawab, tetapi juga yang berkenaan dengan kata mengapa dan apa jadinya.

Dalam interpretasi, seorang sejarawan tidak perlu terkungkung oleh batas-batas kerja bidang sejarah semata, sebab sebenarnya kerja sejarah melingkupi segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk memahami kompleksitas sesuatu peristiwa, maka mau tidak mau sejarah memerlukan pendekatan multidimensi. Dengan demikian, berbagai ilmu bantu perlu dipergunakan dengan tujuan mempertajam “pisau analisis” sehingga diharapkan dapat diperoleh generalisasi ke tingkat yang lebih sempurna.

Perlu pula dikemukakan di sini, bahwa dalam tahapan interpretasi inilah subjektifitas sejarawan bermula dan turut mewarnai tulisannya dan hal itu tak dapat dihindarkan. Walau demikian, seorang sejarawan harus berusaha sedapat mungkin menekan subjektifitasnya dan tahu posisi dirinya sehingga nantinya tidak membias ke dalam isi tulisannya.

#### 4. *Historiografi*

Merupakan langkah terakhir dari metode histories berupa penulisan, pemaparan, atau penyusunan fakta sejarah menjadi suatu kisah sejarah yang menarik dan dapat dipercaya kebenarannya. Dalam hal ini, imajinasi diperlukan untuk merangkaikan fakta yang satu dengan yang lain sehingga menjadi suatu kisah sejarah yang menarik. Selain penggunaan bahasa yang baik dan benar, diperhatikan pula unsur keindahan atau seni penulisan sehingga selain cerita sejarah berfungsi edukatif, dapat juga berfungsi reaktif.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah pola pikir yang digunakan untuk memecahkan persoalan dalam penelitian. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan multidimensional, yaitu pendekatan yang menggunakan berbagai jenis konsep, hipotesis, dan teori sebagai kerangka referensi yang dipakai untuk mencari dan mengatur data penulisan sejarah dapat lebih lengkap dalam mempelajari fenomena historis yang kompleks. Pendekatan ini dipilih karena fenomena historis sebagai kompleksitas dapat diinterpretasikan melalui sudut pandang ekonomi, sosiologis, antropologis, dan politik. Pandangan yang semakin meluas terhadap peristiwa sekitar manusia sebagai hasil dari banyaknya data yang terkumpul, metode yang semakin efisien serta terminologi-terminologi yang eksak dari cabang-cabang ilmu sosial menuntut agar ilmu sejarah menggunakan hasil yang diperoleh dari disiplin ilmu lain.<sup>50</sup>

Pendekatan politik, merupakan suatu bermacam-macam tindakan sistim politik dalam melaksanakan tujuan.<sup>51</sup> Pendekatan politik digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam penelitian ini, Pendekatan politik digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran Amerika Serikat dan tindakan pada peristiwa Gestapu tahun 1965.

---

<sup>50</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 5.

<sup>51</sup> Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, *op.cit.*, hlm. 12.

Pendekatan Ideologi, merupakan pendekatan mengenai ideologi yang dipakai oleh suatu bangsa. Pendekatan ini digunakan untuk menyoroti mengenai latar belakang Amerika Serikat ikut campur dalam urusan negara Indonesia, karena pada waktu itu, Amerika Serikat berusaha membendung pengaruh Komunis Cina kepada Indonesia yang dikenal dengan Politik Domino.

Pendekatan militer, memahami adanya sekelompok orang yang diorganisasikan dengan disiplin militer yang memiliki tujuan untuk bertempur dan memenangkan peperangan guna mempertahankan ideologi dan memelihara eksistensi negara.<sup>52</sup> Skripsi ini menggunakan pendekatan militer untuk menyoroti keterlibatan Amerika Serikat dalam SESKOAD yang bisa memainkan peran penting dalam mengubah AD dari fungsi revolusioner menjadi kontra revolusi dan mengembangkan suatu doktrin strategis baru yakni doktrin Perang Wilayah.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai penulisan ini, sedikit penjelasan terhadap garis besar penulisan “Dukungan Amerika Serikat Terhadap Karier Politik Soeharto: Suatu Kajian Sejarah Politik Penggulingan Soekarno 1965-1967.”, yaitu:

---

<sup>52</sup> Nugroho Notosusanto, *Sejarah dan Hankam*, Jakarta: Dephankam, 1968, hlm. 36.

Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan historiografi yang relevan, metode penelitian dan pendekatan penelitian serta sistematika pembahasan.

Pada bab ke dua ini berisi mengenai kondisi nasional sebelum peristiwa 30 September 1965 dilihat dari segi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Munculnya ideologi dari Demokrasi Terpimpin yang dikenal dengan nama Manifesto Politik (Manipol). Munculnya segitiga kekuasaan yaitu Soekarno, Tentara (Angkatan Darat), dan PKI. Selain itu, dideklarasikan Manifestasi Kebudayaan (Manikebu) untuk mencegah bahaya subversi asing. Manikebu menjadi kelompok budayawan yang berseberangan dengan pemikiran Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang berafiliasi pada komunis.

Bab tiga ini berisi tentang seputar peristiwa 30 September 1965 dari latar belakang sampai jalannya peristiwa serta kontroversi mengenai siapa yang bertanggung jawab dibalik peristiwa tersebut. Selain itu juga akan menjelaskan mengenai keterlibatan oknum PKI, Angkatan Darat, dan Amerika Serikat melalui CIA dalam peristiwa 30 September 1965.

Selanjutnya dalam bab empat akan dijelaskan mengenai peranan Soeharto pada saat menjabat sebagai Pangkostrad terkait peristiwa 30 September 1965, kemudian tindakan-tindakan politik yang diambil saat beliau diangkat sebagai Pangkopkamtib, hingga diangkat menjadi Pejabat Presiden, dan kemudian menduduki kursi kepresidenan.

Dalam bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh penulis. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari apa yang menjadi pokok permasalahan yang ada dan disajikan dalam rumusan masalah. Selain kesimpulan, saya juga menambahkan implikasi, dan saran.